



EDISI RABU 21 JANUARI 2026

HARIAN

LENTERA

GOVERNMENTTODAY
Mulai Februari, 32 Ribu Pegawai MBG
Diangkat Jadi PPPKNUSANTARA
Black Box ATR Belum Ditemukan,
Pencarian Korban Terus DilakukanLISTSTYLE
Cek Trik Kecantikan Low Budget yang
Efektif

02

05

10

Bupati Pati Sudewo Resmi Tersangka

Bupati Pati Sudewo (ketiga kiri) dikawal petugas setibanya di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jakarta, Selasa (20/1/2026). OTT tersebut terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Pati. Uang tunai senilai Rp 2,6 miliar disita. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Bupati Pati Sudewo, tiga orang kepala desa juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Berita terkait baca Hal.5. (Dok:ant)

RUPIAH SENTUH LEVEL TERLEMAH SEPANJANG SEJARAH!

Nilai tukar rupiah kembali mencatatkan rekord terlemah sepanjang sejarah pada perdagangan Selasa (20/1/2026). Mata uang Garuda ditutup melemah 0,14 persen ke posisi Rp 16.978 per dollar AS, menandai tekanan lanjutan yang semakin mendekati level psikologis Rp 17.000 per dollar AS. Pelemanan juga tercermin pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia yang turun 46 poin atau 0,27 persen ke level Rp 16.981 per dollar AS. Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bisa membalikkan kondisi pelemanan nilai tukar rupiah hanya dalam semalam. Namun karena dirinya bukan Bank Sentral, maka kewenangan ada di Bank Indonesia (BI). Ia mengaku heran nilai tukar rupiah jeblok padahal aliran duit yang masuk ke Indonesia melalui pasar modal mengalir deras. Ketika nilai tukar rupiah melemah, dampaknya tidak berhenti pada papan kurs di bank atau money changer. Pergerakan ini memicu efek berantai yang merembet ke berbagai sektor ekonomi dan pada akhirnya memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Mulai biaya produksi bengkak, hingga penurunan daya beli. BACA HAL 11...

PERGERAKAN RUPIAH (JANUARI 2026)



MULAI FEBRUARI, 32 RIBU PEGAWAI MBG DIANGKAT JADI PPPK

Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap mengangkat sebanyak 32 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan mulai efektif pada Februari 2026. Pengangkatan ini merupakan bagian dari rekrutmen PPPK tahap kedua di lingkungan BGN, dengan mayoritas formasi diperuntukkan bagi jabatan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

FAKTA TERBARU MENGENAI PROGRAM MBG:

Rincian Anggaran dari Tahun ke Tahun:

- 2025: Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN. Realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5% dari pagu tersebut.
- 2026: Anggaran MBG melonjak drastis menjadi Rp335 triliun. Dari total tersebut, Rp268 triliun dialokasikan langsung ke BGN, sementara Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan untuk menjamin efektivitas program.
- Realisasi Terkini (Januari 2026): Hingga 20 Januari 2026, anggaran yang telah digelontorkan untuk pelaksanaan program tahun ini telah mendekati Rp18 triliun.

Target dan Jangkauan Penerima Manfaat:

- Target Utama: Program ini menargetkan total 82,9 juta orang pada tahun 2026, yang mencakup siswa PAUD hingga SMA/SMK, anak putus sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
- Status Saat Ini: Per 19 Januari 2026, program telah menjangkau 58,3 juta penerima manfaat melalui operasional 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Prioritas 2026: Pemerintah memfokuskan intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari ibu hamil hingga anak usia dua tahun.



Proses persiapan paket makanan untuk program makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Plaju Ulu II di Palembang, Sumatera Selatan. ant

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, seluruh proses seleksi untuk tahap kedua telah rampung. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1/2026). "Kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000," ucap Dadan.

Dari total formasi tersebut, sebanyak 31.250 posisi dialokasikan untuk Kepala SPPG yang akan diisi oleh lulusan Sarjana Penggerak

Pembangunan Indonesia (SPPI). Selain itu, BGN juga membuka 750 formasi untuk jabatan akuntan serta 375 formasi tenaga gizi guna mendukung aspek teknis dan administrasi program MBG secara nasional.

Dadan menjelaskan, para peserta yang akan diangkat telah melewati seluruh tahapan seleksi dan saat ini proses rekrutmen memasuki fase administratif. Tahap tersebut meliputi pengisian daftar riwayat hidup hingga pengusulan nomor induk

PPPK. "Diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai tanggal 1 Februari 2026," lanjutnya.

Sebelumnya, BGN telah lebih dulu melakukan pengangkatan PPPK tahap pertama dengan total 2.080 formasi. Untuk tahap awal tersebut, pengangkatan pegawai telah ditetapkan terhitung mulai 1 Juli 2025. "Kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk PPPK tahap 1 sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025," ujar Dadan.

Tak hanya berhenti pada dua tahap rekrutmen, BGN juga berencana melanjutkan pengangkatan PPPK pada tahap ketiga dan keempat.

Masing-masing tahap direncanakan membuka 32.460 formasi baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan BGN seiring perluasan pelaksanaan program MBG. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap 3 dan 4," sambung Dadan.

Kebijakan percepatan pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN PPPK ini belakangan menuai sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama di tengah masih belum jelasnya nasib ribuan guru honorer. Kritik datang dari akademisi hingga organisasi guru yang menilai pemerintah terlalu cepat memprioritaskan pegawai dapur MBG dibandingkan guru sebagai garda terdepan pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang sebelumnya menegaskan bahwa frasa "pegawai SPPG" dalam Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG merujuk secara terbatas pada jabatan inti yang memiliki fungsi strategis. "Yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK," kata Nanik.

Pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK merupakan amanat langsung dari Perpres Nomor 115, yang menyebutkan bahwa pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas program MBG yang menjadi salah satu prioritas nasional. (wid, ist, kum/dya)

BGN Bantah MBG Sedot Dana Pendidikan

Badan Gizi Nasional (BGN) membantah keras narasi yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyebab pemotongan anggaran pendidikan maupun terhambatnya pengangkatan guru honorer. Pemerintah menegaskan, informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik.

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan isu pemangkasan anggaran pendidikan hingga Rp 335 triliun-Rp 400 triliun demi membiayai program MBG merupakan kabar bohong atau hoaks. Ia menegaskan, anggaran MBG tidak diambil secara khusus dari pendidikan.

Menurut Nanik, berdasarkan klarifikasi Menteri Keuangan Purbaya, pembiayaan program MBG berasal dari efisiensi anggaran seluruh kementerian dan lembaga. Bahkan, Kementerian

Keuangan sendiri turut mengalami pemangkasan anggaran. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan dana pampasan hasil tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan program tersebut.

"Jadi jelas ya tidak ada kaitannya antara pemotongan anggaran pendidikan untuk MBG dengan pengangkatan ASN guru honorer," tegas Nanik.

Ia juga meluruskan perbandingan yang sempat viral di media sosial mengenai gaji sopir MBG yang disebut mencapai Rp 3 juta per bulan dan dibandingkan dengan honor guru honorer. Nanik menjelaskan, gaji sopir MBG dihitung secara harian sebesar Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu. Dengan skema tersebut, total penghasilan maksimal berkisar antara Rp 1,9 juta hingga Rp 2,4 juta per bulan apabila bekerja penuh tanpa absen.

"Saya kira membandingkan profesi

guru dengan pencuci ompreng, sopir MBG dan lainnya dengan guru, itu justru merendahkan para pendidik," ujar Nanik.

Sementara itu, Nanik menegaskan bahwa postur anggaran pendidikan nasional justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp 608,3 triliun pada 2023, naik menjadi Rp 665 triliun pada 2024, kemudian Rp 724,3 triliun pada 2025, dan diproyeksikan mencapai Rp 757,8 triliun pada 2026.

Menurut Nanik, hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak menggerus anggaran pendidikan. Ia menegaskan, program MBG dan pembangunan pendidikan nasional berjalan beriringan, dibuktikan dengan tetap berlangsungnya pembangunan Sekolah Rakyat, peningkatan kuota beasiswa LPDP, pembukaan fakultas kedokteran gratis, serta pengembangan sekolah unggulan Garuda di bidang STEM. (ist, tin, kcm/dya)

Rapat Dengar Pendapat RUU Pemilu

SOROTI POLITIK UANG, DEMOKRASI PUN DIPERTANYAKAN

Persoalan utama pemilu di Indonesia bukan terletak pada pilihan sistem, melainkan pada merosotnya kualitas demokrasi yang ditandai maraknya politik uang, mahalnya ongkos politik, serta lemahnya keterhubungan antara wakil rakyat dan pemilih. Dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR, Selasa (20/1/2026) Puskapol UI bersama CSIS dan Perludem mendorong perombakan regulasi secara komprehensif melalui kodifikasi hukum pemilu agar pemilu kembali berfungsi sebagai instrumen kedaulatan rakyat, bukan sekadar mekanisme sirkulasi elite politik.

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menilai persoalan utama pemilu di Indonesia saat ini tidak semata-mata terletak pada pilihan sistem pemilu, melainkan pada kualitas demokrasi yang kian terlepas dari fungsi substantif pemilu itu sendiri.

Penilaian tersebut disampaikan peneliti Puskapol UI, Hurriyah, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026), dalam rangka memberikan masukan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Hurriyah menilai terdapat jarak yang semakin lebar antara pemilu sebagai mekanisme demokrasi dengan praktik demokrasi yang berjalan di Indonesia. Menurutnya, pemilu lebih banyak berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dan sirkulasi elite, sekaligus alat menempatkan wakil-wakil partai politik di parlemen, dibandingkan sebagai instrumen kedaulatan rakyat.

"Ada diskoneksi antara pemilu di Indonesia gitu ya dengan bekerjanya demokrasi. Jadi kita punya pemilu sebagai mekanisme demokrasi tetapi dia lebih banyak berfungsi untuk rekrutmen politik, sirkulasi elite, dan juga menempatkan wakil-wakil partai di dalam Parlemen," ujar Hurriyah.

Ia menyoroti pembahasan pemilu yang belakangan cenderung terjebak pada aspek teknis, seperti perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, maupun alternatif sistem lainnya. Menurutnya, perdebatan tersebut kerap mengabaikan persoalan mendasar demokrasi yang justru menentukan kualitas pemilu.

"Kita punya pemilu seolah-olah pemilunya demokratis tetapi masyarakat sebenarnya tidak punya keleluasaan untuk memilih siapa calonnya," kata Hurriyah.

Hurriyah menilai keterbatasan pilihan pemilih tidak lepas dari mekanisme pencalonan di internal partai politik yang masih sarat dengan praktik patronase, politik dinasti, dan hubungan kekerabatan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya politik pragmatis dan semakin menjauhkan pemilu dari nilai-nilai demokrasi substantif.



Berbagai persoalan kronis pun terus berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Ia menegaskan, masalah politik uang, mahalnya ongkos politik,

korupsi, hingga lemahnya relasi antara wakil rakyat dan pemilih masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Namun, diskursus publik dan kebijakan justru

Isu Krusial: Pengaturan Ambang Batas

KOMISI II DPR RI mulai menginventarisasi sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus utama dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembaruan regulasi kepemiluan sejalan dengan konstitusi, dinamika praktik pemilu, serta kebutuhan perbaikan kualitas demokrasi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menjelaskan, tahapan awal revisi UU Pemilu diarahkan pada penyesuaian norma hukum pemilu dengan landasan konstitusional, perkecambangan empiris penyelenggaraan pemilu, dan evaluasi tata kelola demokrasi yang berjalan selama ini. Hal tersebut disampaikan Aria saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama kalangan akademisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut Aria, pembahasan Revisi UU Pemilu mencakup berbagai domain penting, termasuk penguatan aturan agar tetap berpijak pada Undang-Undang Dasar,

sekaligus mampu menjawab tantangan praktik kepemiluan yang terus berkembang. Ia menekankan pentingnya regulasi pemilu yang adaptif namun tetap berkeadilan.

Salah satu isu krusial yang mengemuka dalam pembahasan awal adalah pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Perdebatan ini menguat pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIII/2024 yang berdampak pada konstruksi norma presidential threshold.

Selain itu, Komisi II DPR juga menyoroti sistem pemilu legislatif yang saat ini menggunakan mekanisme proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu. Sistem ini kembali menjadi sorotan seiring berbagai masukan publik dan evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Isu ambang batas parlemen turut menjadi perhatian, terutama yang dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 116/PUU-XVIII/2023. Di sisi lain, pembahasan mengenai verifikasi partai politik juga dinilai relevan untuk dikaji ulang dengan

terus berkutat pada pertanyaan soal sistem pemilu.

"Kita selalu terjebak pada pertanyaan ini sistemnya udah baik atau atau belum gitu ya. Karena masalah utama kita sebenarnya bukan di sistem," ujarnya.(gus,kum,ant/dya)

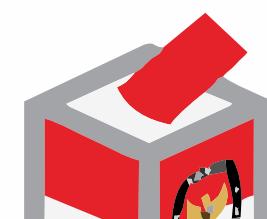
POIN-POIN PENTING MENGENAI PERKEMBANGAN REVISI UU PEMILU

Target dan Jadwal Pembahasan

- Januari 2026: Penyusunan draf revisi dimulai.
- Juni 2026: Target finalisasi draf revisi.
- Juli–Agustus 2026: Pembahasan ditargetkan rampung untuk dasar seleksi KPU–Bawaslu periode 2027–2032 (mulai Agustus 2026).
- November 2026: Target akhir seluruh proses pembahasan.

Isu Strategis yang Dibahas

- **Kodifikasi Hukum Pemilu:** Wacana penggabungan UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik dalam satu naskah hukum.
- **Ambang Batas (Threshold):** Penyesuaian parliamentary dan presidential threshold sesuai putusan MK, termasuk usulan penurunan ber tahap ambang batas parlemen (3,5% pada Pemilu 2029).
- **Sistem Keserentakan:** Penataan ulang jadwal pemilu dan pilkada agar tidak membebani penyelenggara.
- **Kemandirian Penyelenggara:** Penguatan pengawasan dan independensi KPU dan Bawaslu.



merujuk pada Putusan MK Nomor 55 Tahun 2020.

Komisi II DPR RI juga memetakan pengaturan daerah pemilihan (dipil) berserta mekanisme pembentukannya sebagai isu penting, sejalan dengan Putusan MK Nomor 80 Tahun 2022. Penataan dipil dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas representasi politik.(wid,ist/kum)

BLACK BOX ATR BELUM DITEMUKAN, PENCARIAN KORBAN TERUS DILAKUKAN

Proses pencarian kotak hitam (black box) pesawat ATR 42-500 registrasi PK-THT yang mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, hingga kini belum membawa hasil. Sementara, tim SAR berhasil mengevakuasi dua korban dari lokasi penemuan menuju posko utama di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait penemuan perangkat penting tersebut dan masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab kecelakaan.

"Bisa kami sampaikan, sampai saat ini kami belum dilaporkan apakah sudah ditemukan atau tidak black boxnya," ujar Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (20/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Menhub memaparkan kronologi kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang pada 17 Januari 2026 disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk misi surveilans di wilayah perairan Indonesia. Pesawat tersebut terbang



Sejumlah serpihan pesawat dan barang-barang korban pesawat ATR 42-500 yang jatuh di Gunung Bulusaraung, Sulsel. (Dok. Basarnas/Tim SAR Gabungan)

dari Yogyakarta menuju Makassar dengan membawa 10 orang, terdiri dari tujuh awak pesawat dan tiga penumpang dari KKP.

Pada pukul 12.23 WITA, layanan

pengendalian lalu lintas udara (ATC) Makassar mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu Runway 21 Bandara Sultan Hasanuddin. Namun, ATC



Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (tengah) dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syaifi (kedua kiri) berbincang dengan Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko (kanan) dan Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar Andi Sultan (kedua kanan) saat meninjau proses pencarian pesawat ATR 42-500 di posko aju Tompo Bulu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2026). Ist

DPR Geram: Jangan Seolah Tak Ada Pilihan Selain Tabrak Gunung

tahanan KPK. Kehadirannya untuk menjalani sidang pembacaan surat dakwaan kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di lingkungan Kemnaker.

Di hadapan awak media sebelum sidang dimulai, Noel menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum tanpa meminta keringanan atau amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nggaklah, nggak usah, kita ikut prosesnya dululah. Harapannya sih pengen bebas," ujar Noel singkat.

Namun pernyataan paling menyita perhatian justru muncul ketika Noel menyinygung adanya kekuatan lain di balik perkara ini. Ia mengaku saat ini telah "diorchestrasikan" sebagai gembong koruptor, dan memilih untuk mengiyakan label tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa praktik pemerasan sertifikasi K3 melibatkan lebih banyak pihak.

"Tapi ketika kita sudah diorchestrasikan sebagai gembong koruptor, kita akan mengiyakan sebagai gembong

koruptor. Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini," kata Noel.

Ia belum membeberkan identitas partai dan ormas yang dimaksud. Noel berjanji akan membuka secara gamblang dalam persidangan berikutnya. "Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya," ujarnya.

Pernyataan serupa kembali ditegaskan Noel saat sidang diskors. Ia menyebut keterlibatan pihak di luar aparatur sipil negara (ASN) dan swasta, termasuk pengusaha. "Nanti saya sampaikan, ada pengusaha, parpol, dan ormas," kata Noel.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Noel didakwa menerima uang hasil pemerasan dan gratifikasi dengan total Rp 3.365.000.000 pada periode Oktober 2024 hingga Agustus 2025, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain uang tunai, Noel juga didakwa menerima satu unit sepeda motor Ducati Scrambler dengan nomor polisi B 4225 SUQ dari ASN Kemnaker dan pihak swasta lain. (wid,ist,kum/dya)

SIDANG perdana kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan menjadi panggung pernyataan keras mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel.

Tiba di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026), Noel menyatakan bahwa perkara yang menjeratnya tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga pengusaha.

Noel tiba di pengadilan sekitar pukul 09.59 WIB dengan mengenakan kemeja batik yang dibalut rompi oranye

mendeteksi posisi pesawat tidak berada pada jalur pendekatan yang semestinya dan memberikan instruksi koreksi agar kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Tak lama berselang, komunikasi antara ATC dan pesawat terputus.

ATC kemudian mendeklarasikan fase darurat, disusul koordinasi lintas instansi oleh AirNav Indonesia bersama Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk membentuk pusat krisis (crisis center) di Bandara Sultan Hasanuddin.

Operasi pencarian terpadu dimulai pada Minggu (18/1/2026) pukul 06.15 WITA dengan mengerahkan pesawat nirawak (drone) milik TNI AU di wilayah Gunung Bulusaraung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep. Sekitar pukul 07.46 WITA, tim SAR gabungan mengidentifikasi serpihan pesawat berupa jendela sebagai penanda awal lokasi kecelakaan.

Tiga menit kemudian, serpihan besar yang diduga bagian badan pesawat dan ekor ditemukan. Pada pukul 11.59 WITA, pos komando krisis Basarnas menerima laporan penemuan satu jenazah laki-laki yang langsung dievakuasi.

Koordinasi ulang operasi SAR kembali dilakukan pada Senin (19/1/2026) di posko terdekat lokasi kejadian di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep.

Menhub Dudy mengungkapkan kondisi cuaca di lokasi sangat tidak bersahabat. "Pada saat kunjungan dilakukan pada Senin kemarin, terlihat memang kondisi cuaca di lokasi cukup tebal awannya. Jadi dari pagi hingga sore itu cuacanya hujan, dan itu sangat menyulitkan bagi tim penyelamat untuk melaksanakan pekerjaannya," ujarnya.

Ia juga menyoroti medan ekstrem di lokasi dengan kemiringan sekitar 70-80 derajat yang licin akibat hujan.

Sejalan dengan pernyataan Menhub, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memastikan hingga kini kotak hitam pesawat juga belum ditemukan. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syaifi mengatakan tim SAR baru menemukan Emergency Locator Transmitter (ELT) pada Minggu (18/1/2026).

"Izin kami belum menemukan bagian pesawat yang tanda-tandanya blackbox," kata Syaifi dalam rapat bersama Komisi V DPR RI.

Syaifi menjelaskan, ELT berfungsi mengirimkan sinyal darurat ke satelit untuk membantu penentuan lokasi pesawat pascakecelakaan. Namun, perangkat tersebut diketahui tidak aktif.

"Jadi saat ini yang kami temukan adalah ELT, dan kenapa ELT tidak aktif padahal kami punya stasiun kecil dan seharusnya menangkap distress nanti KNKT yang akan menjelaskan [lebih lanjut]," tuturnya. (kum,tin,ist/dya)

KONTROVERSI SEBELUM OTT KPK

WALI KOTA MADIUN MAIDI

- Larangan hajatan prasmanan karena menekan sampah, TPA Winongo menumpuk
- Wajib boks/kardus karena dinilai lebih hemat dan minim sisa
- Sindiran soal "gengsi" karena hajatan besar dianggap boros
- Larangan ASN pakai LPG subsidi dengan alasan "hak warga miskin"

BUPATI PATI SUDEWO

- Kenaikan PBB hingga 250% (2025) sehingga memicu demo dan gejolak politik
- Muncul wacana pemakzulan karena DPRD membahas pansus, namun tak berlanjut
- Terseret kasus DJKA Kemenhub, KPK menyita ±Rp3 miliar
- Disebut terima Rp720 juta sebagai commitment fee proyek KA
- Diklaim berasal dari gaji dan usaha dalam sidang Tipikor

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, dalam kasus Madiun, dana CSR dijadikan alat untuk menarik fee dari pihak swasta dan pelaku usaha dengan dalih kepentingan pembangunan daerah. Praktik itu dinilai tidak hanya merugikan keuangan, tetapi juga mencederai hak masyarakat.

"Maka ketika dana CSR digunakan sebagai modus operandi untuk menerima fee atau imbalan, yang dirugikan bukan hanya keuangan, namun juga mencederai hak masyarakat atas pembangunan yang adil," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/1/2026).

KPK menemukan bahwa penggunaan CSR tersebut bertentangan dengan peraturan wali kota tentang tanggung jawab sosial perusahaan (TSP). Dana yang seharusnya dikelola secara kredibel untuk kepentingan publik justru disimpangi dan diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Ini sudah ada aturannya sebetulnya, tetapi kemudian disimpangi oleh oknum tersebut, lalu digunakan untuk keperluan pribadi," kata Asep.

Dalam konstruksi perkara, Madiun selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 disebut memberikan kewenangan pengumpulan uang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Madiun.

Pengumpulan dana tersebut menyalahgunakan pengelola Sekolah Tinggi

Wali Kota Madiun Madi tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dia tiba pukul 22.35 WIB, Senin (19/1/2026). Ist



Kepala Daerah Madiun dan Pati Terjerat OTT KPK

MAIDI PAKAI MODUS CSR, SUDEWO LAKUKAN PEMERASAN

Dua kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan modus yang berbeda, namun bermuara pada praktik pemerasan kekuasaan. Wali Kota Madiun Madi diduga memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kedok penerimaan gratifikasi. Sementara Bupati Pati Sudewo menggunakan ancaman penutupan formasi jabatan untuk memeras calon perangkat desa.

Ilmu Kesehatan (STIKES) Bakti Husada Mulia Madiun.

STIKES tersebut diminta menyerahkan uang Rp350 juta terkait izin akses jalan selama 14 tahun. Permintaan itu dibungkus dengan dalih kontribusi CSR Kota Madiun.

"Jadi ada satu sekolah tinggi ilmu kesehatan diminta menyerahkan uang sebesar Rp350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam

bentuk uang sewa selama 14 tahun, dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun," ungkap Asep.

Tak berhenti di situ, KPK juga menemukan dugaan pemerasan lain berupa permintaan fee penerbitan izin usaha kepada pelaku bisnis, mulai dari hotel, minimarket, hingga jaringan waralaba.

"Jadi selain permintaan tadi ke STIKES, ada juga untuk mendirikan usaha di sana, dimintai pengajuan

izinya oleh oknum wali kota," jelas Asep.

Dari hasil penelusuran, KPK mencatat dugaan penerimaan gratifikasi pada periode 2019-2022 dengan total mencapai Rp1,1 miliar. Atas kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Madi, seorang pihak swasta yang menjadi orang kepercayaannya, serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. (wid,rls,kum/dya)

Kemendagri Sebut Jadi Peringatan Keras

OPERASI tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kepala daerah dalam satu hari dinilai sebagai sinyal peringatan serius bagi seluruh pejabat publik di daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut penangkapan Wali Kota Madiun Madi dan Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1/2026) sebagai peristiwa yang mengejutkan sekaligus memprihatinkan di awal tahun 2026.

"Kabar yang sungguh mengejutkan dan memprihatinkan di awal tahun 2026 ini," kata Kepala Penerangan Kemendagri Benni Irwan.

Benni menegaskan, dua OTT yang terjadi hampir bersamaan itu harus menjadi peringatan keras bagi kepala daerah lain agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia juga mengimbau seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

"Dan sekaligus menjadi warning bagi kepala daerah lainnya agar menghindari perilaku korupsi yang dapat merugikan berbagai pihak," ujarnya.

Kemendagri menilai dua kasus ini memberikan pelajaran penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya terkait proses rekrutmen kepala daerah. Pasalnya, para kepala daerah yang terjerat OTT tersebut merupakan pilihan langsung rakyat melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Kejadian ini tentunya memberikan pelajaran tersendiri bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Kepala daerah yang terjerat OTT tersebut merupakan mereka yang dipilih oleh rakyat dari hasil pilkada secara langsung," kata Benni.

Menurut Kemendagri, fakta ini menunjukkan bahwa pilkada langsung tidak otomatis menjamin lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas. Pembinaan dari pemerintah pusat, termasuk

Kemendagri, juga dinilai tidak akan efektif jika persoalan utama berada pada niat dan perilaku kepala daerah itu sendiri.

"Pembinaan demi pembinaan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Kemendagri, tidak akan maksimal jika akar masalahnya, yaitu sistem rekrutmen kepala daerah melalui pilkada langsung tidak diperbaiki dan perilaku kepala daerah yang memang niatnya mau korupsi tidak dibasmi," ujar Benni.

KPK memastikan proses penyidikan terhadap kedua perkara tersebut masih terus berjalan. Lembaga antirasuah itu juga membuka peluang penelusuran aliran dana serta keterlibatan pihak lain. Sementara bagi Kemendagri, dua OTT dalam sehari ini menjadi alarm keras bahwa pengawasan, integritas, dan perbaikan sistem rekrutmen kepala daerah harus diperkuat agar praktik korupsi di daerah tidak terus berulang. (gus,ist/dya)

Ditarget Selesai Desember 2026, Puskesmas Bareng di Jalan Bondowoso Digelontor Rp7,1 M



Bakal lahan relokasi Puskesmas Bareng, Jalan Bondowoso, Kota Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan pembangunan relokasi Puskesmas Bareng akan segera direalisasikan pada Juli 2026, di Jalan Bondowoso. Realisasi fasilitas layanan kesehatan tersebut direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp7,1 miliar. Targetnya selesai pada awal Desember 2026.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan penetapan lokasi

(20/1/2026).

Dijelaskannya, lahan yang disiapkan untuk pembangunan Puskesmas Bareng memiliki luas sekitar 3.142 meter persegi. Saat ini, proses pembangunan telah memasuki tahapan Detail Engineering Design (DED) yang sudah dimasukkan ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Malang.

"Nanti setelah jasa konsultan

pembangunan Puskesmas Bareng pada prinsipnya sudah mengerucut dan tinggal menunggu penandatanganan penetapan lokasi oleh Wali Kota Malang.

"Puskesmas Bareng nanti akan dibangun di Jalan Bondowoso, yang di depannya Universitas Widya Karya. Beberapa waktu lalu kami sudah ada rapat koordinasi yang dipimpin Pak Sekda. Penetapan lokasinya kemungkinan sudah ada di Pak Wali Kota, tinggal ditandatangani," ujar Husnul, Selasa

perencana selesai, baru dilanjutkan ke jasa konstruksi," jelasnya.

Menurut Husnul, jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pekerjaan konstruksi Puskesmas Bareng ditargetkan mulai dikerjakan pada Juli 2026. Adapun target penyelesaian pembangunan ditetapkan maksimal pada awal Desember 2026.

Terkait fasilitas layanan kesehatan, Husnul memastikan Puskesmas Bareng akan dibangun sesuai standar puskesmas pada umumnya. Ia menegaskan tidak akan ada penambahan layanan rawat inap dalam pembangunan puskesmas tersebut. "Fasilitasnya sesuai standar puskesmas, tidak ada rawat inap," katanya.

Sementara untuk kebutuhan tenaga kesehatan, Husnul menyebut rekrutmen sepenuhnya menjadi kewenangan pengelola puskesmas. Mengingat Puskesmas Bareng berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mekanisme penambahan tenaga kesehatan diserahkan kepada manajemen BLUD.

Lebih lanjut dari sisi anggaran, Husnul mengungkapkan pembangunan Puskesmas Bareng akan menggunakan dana sebesar

Rp7,1 miliar. Nilai tersebut mengalami penyesuaian dari rencana awal yang sempat mencapai Rp10 miliar.

"Awalnya sekitar Rp10 miliar, kemudian Rp8 miliar sekian, lalu ada perhitungan-perhitungan sehingga menjadi Rp7,1 miliar. Itu sudah mencakup DED dan konstruksi," jelasnya.

Pihaknya juga meluruskan informasi yang beredar terkait isu pemindahan lokasi pembangunan ke area kos-kosan di Jalan Simpang Bondowoso. Menurutnya, pembangunan Puskesmas Bareng tidak berpindah lokasi, melainkan berada dalam satu kawasan lahan yang mencakup beberapa titik.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan. Ia membenarkan sebagian lahan seluas 3.142 meter persegi tersebut saat ini masih dimanfaatkan sebagai rumah kos.

"Kami berencana memanggil pemilik dalam waktu dekat, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Intinya sekarang masih dalam proses," kata Subkhan. (Santi/Dya)

Meski Sektor Kuliner Moncer, Realisasi Pajak Kota Batu 2025 Tak Sesuai Target

BATU - Kinerja sektor kuliner yang moncer sepanjang 2025 belum berbanding lurus dengan capaian pajak daerah Kota Batu secara total. Hingga akhir tahun, realisasi pendapatan pajak daerah tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp275 miliar.

"Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman mencapai Rp38,8 miliar dari target Rp35,9 miliar atau 108 persen dari target," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, M Nur Adhim, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, sepanjang tahun 2025 realisasi pendapatan pajak daerah mencapai Rp262 miliar dari target Rp275 miliar, atau setara 95,21 persen. Capaian tersebut diklaim menunjukkan kinerja pendapatan daerah masih berada pada kondisi relatif aman, meski belum sepenuhnya optimal.

Lebih lanjut, Adhim mengatakan selain PBJT makanan dan minuman atau kuliner, pendapatan pajak daerah

tersebut bersumber dari 10 jenis pajak lainnya. Namun diakuinya, Pajak Barang dan Jasa Tertentu menjadi salah satu kontributor utama dalam struktur penerimaan.

"Dari seluruh jenis PBJT, sektor makanan dan minuman mencatatkan realisasi tertinggi. Penerimaan PBJT makanan dan minuman bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan," katanya.

Menurut Adhim, capaian tersebut mencerminkan pertumbuhan sektor kuliner di Kota Batu yang masih terjaga sepanjang tahun lalu. Kondisi ini didukung oleh daya beli masyarakat yang relatif stabil serta aktivitas pariwisata yang terus berjalan.

Selain sektor kuliner, kontribusi signifikan juga datang dari PBJT kesenian dan hiburan. Dari target Rp47,4 miliar, menurutnya realisasi penerimaan tercatat Rp44,5 miliar atau 94,08 persen.

Sementara itu, sektor perhotelan turut menyumbang penerimaan pajak daerah sebesar Rp40,7 miliar, setara 94,56 persen dari target Rp43 miliar.

"Hotel juga masih menjadi sektor penting, meskipun terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya," tambah Adhim.

Ditegaskannya, hampir seluruh target juga berhasil dipenuhi oleh PBJT tenaga listrik. Sepanjang 2025, realisasi penerimaan dari sektor ini mencapai Rp19,4 miliar atau 99,58 persen dari target.

Namun demikian, Adhim menyebut PBJT parkir masih menjadi catatan bagi Pemkot Batu. Dari target Rp4,7 miliar, realisasi penerimaan baru mencapai Rp1,1 miliar atau 23,91 persen, sehingga masih memerlukan upaya optimalisasi lebih lanjut.

Di luar kelompok PBJT, pajak berbasis transaksi justru menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi Rp62,5 miliar atau 117,94 persen dari target



Ilustrasi: Wali Kota Batu, Nurochman menunjukkan produk UMKM kuliner khas Kota Batu kepada Menteri Ekraf RI di Oktober 2025 lalu. (Santi/Lentera)

Rp53 miliar.

Sebaliknya, capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih relatif rendah. Dari target Rp34,9 miliar, realisasi penerimaan baru mencapai Rp20,4 miliar atau 58,46 persen. (Santi/Dya)

Dewan Perdamaian Gaza

TRUMP ANCAM PRANCIS, UNDANG RUSIA-CHINA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat manuver kontroversial di panggung diplomasi global. Kali ini, Trump mengancam akan memberlakukan tarif impor sebesar 200 persen terhadap sejumlah produk unggulan Prancis, khususnya wine dan sampanye. Langkah ini sebagai upaya menekan Presiden Prancis Emmanuel Macron agar bersedia bergabung dalam inisiatif internasional bertajuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Washington.

Ancaman itu dilontarkan Trump saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan Macron yang menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian. Menanggapi sikap Macron tersebut, Trump melontarkan komentar bernada sindiran. "Apakah dia mengatakan hal itu? Yah, tidak ada yang menginginkannya karena dia akan segera meninggalkan jabatannya," kata Trump.

Trump kemudian menegaskan ancamannya dengan menyebut produk khas Prancis secara langsung. "Saya akan mengenakan tarif 200 persen terhadap wine dan sampanyenya, dan dia akan bergabung, tetapi dia tidak harus bergabung," ujar Trump.

Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari pihak Prancis. Seorang sumber yang dekat dengan Presiden Macron menegaskan



Presiden Trump dan Emmanuel Macron di Gedung Putih pada tahun 2017.(dok)

bahwa ancaman tarif dari Amerika Serikat tidak dapat diterima. "Ancaman tarif untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri kami tidak dapat diterima dan tidak efektif," kata sumber tersebut kepada AFP, Selasa (20/1/2026).

Sikap Prancis terhadap Dewan Perdamaian memang sudah jelas sejak awal. Sehari sebelumnya, sumber yang sama menyebut Paris akan menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam forum tersebut. Penolakan itu

didasari kekhawatiran terhadap isi piagam Dewan Perdamaian yang dinilai melampaui tujuan awalnya, yakni pengawasan pembangunan kembali Jalur Gaza pascaperang.

Awalnya, Dewan Perdamaian diumumkan Trump sebagai bagian dari rencana perdamaian untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas di Gaza. Namun, draf piagam yang beredar belakangan menunjukkan peran dewan ini tidak dibatasi hanya pada Gaza, melainkan mencakup konflik-konflik global lainnya.

Sumber-sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron mengatakan kepada BFM TV bahwa Prancis tidak bermaksud "memberikan respons yang menguntungkan" terhadap undangan AS itu.

Menurut mereka, fungsi Dewan Perdamaian tersebut dianggap terlalu luas dan mencakup kewenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan konflik di wilayah kantong Palestina itu.

"[Dewan] itu menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB, yang dalam keadaan apa pun tidak boleh dipertanyakan," kata para sumber.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga menyatakan bahwa pihaknya sedang menelaah ketentuan dalam piagam atau dokumen pembentukan dewan itu dan menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap Piagam PBB.

"Piagam PBB tetap menjadi landasan utama multilateralisme yang efektif, di mana hukum internasional, kesetaraan kedaulatan negara, dan penyelesaian sengketa secara damai harus diutamakan daripada tindakan sewenang-wenang, politik kekuasaan, dan perang," kata kementerian itu.

Di tengah penolakan Prancis, Trump justru memperluas jangkauan diplomasi Dewan Perdamaian. Dalam beberapa hari terakhir, ia mengaku telah mengundang sejumlah pemimpin dunia untuk bergabung, mulai dari Rusia, China, Armenia, Maroko, Israel, hingga Polandia. Trump bahkan secara terbuka menyebut telah mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin. "Dia sudah diundang," kata Trump singkat, tanpa menjelaskan respons dari Moskow.

Undangan tersebut dikonfirmasi oleh sejumlah negara. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengakui telah menerima ajakan resmi, meski belum memutuskan sikap akhir. Pemerintah China juga membenarkan telah menerima undangan serupa, namun belum mengungkapkan apakah Beijing akan bergabung atau tidak.

Sementara itu, Maroko menjadi salah satu negara yang secara terbuka menyatakan menerima ajakan Trump, dengan Raja Mohammed VI disebut setuju bergabung sebagai anggota pendiri Dewan Perdamaian. (wid,ist,kum/dya)

Pesawat Militer AS-Kanada Bergerak



Tentara Denmark mendarat di Bandara Nuuk, Greenland, Senin (19/1/2026) waktu setempat, setelah Amerika Serikat mulai menggerakkan sejumlah pesawat militer milik North American Aerospace Defense Command (NORAD) ke Greenland.(ist.reuters)

PESAWAT militer Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara (NORAD) dijadwalkan segera tiba di pangkalan militer Amerika Serikat di Greenland. NORAD menyebut pergerakan pesawat gabungan Amerika Serikat dan Kanada tersebut merupakan bagian dari aktivitas rutin yang telah direncanakan sejak lama.

NORAD juga menyatakan bahwa rencana tersebut telah dikordinasikan dengan pemerintah Denmark dan otoritas Greenland. Pesawat-pesawat yang akan tiba di Greenland nantinya akan beroperasi bersama armada militer yang berbasis di daratan Amerika Serikat dan Kanada. "Mereka akan mendukung berbagai aktivitas NORAD yang telah lama direncanakan, berdasarkan kerja sama pertahanan yang berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Kanada,

keinginannya agar Amerika Serikat menguasai Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark. NORAD sendiri merupakan organisasi pertahanan bersama AS dan Kanada yang bertugas memantau serta melindungi wilayah udara Amerika Utara.

Dalam pernyataannya yang dikutip AFP, NORAD tidak merinci secara detail jenis kegiatan yang akan dilakukan di Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, Greenland. Namun ditegaskan bahwa aktivitas tersebut bertujuan memperkuat "kerja sama pertahanan" yang telah berjalan lama.

NORAD juga menyatakan bahwa rencana tersebut telah dikordinasikan dengan pemerintah Denmark dan otoritas Greenland. Pesawat-pesawat yang akan tiba di Greenland nantinya akan beroperasi bersama armada militer yang berbasis di daratan Amerika Serikat dan Kanada. "Mereka akan mendukung berbagai aktivitas NORAD yang telah lama direncanakan, berdasarkan kerja sama pertahanan yang berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Kanada,

serta Kerajaan Denmark," kata NORAD.

Organisasi itu menambahkan bahwa mereka "secara rutin melakukan operasi berkelanjutan dan tersebar untuk membela Amerika Utara."

Meski disebut sebagai agenda rutin, kehadiran pesawat militer tersebut terjadi di tengah memanasnya situasi politik dan keamanan di kawasan Arktik.

Trump sebelumnya memicu kegelisahan di kalangan sekutu transatlantik dengan pernyataan bahwa Amerika Serikat siap mengambil alih Greenland "dengan cara apa pun." Pada akhir pekan lalu, ia juga mengancam akan menjatuhkan tarif baru terhadap negara-negara yang menentang rencana AS atas pulau strategis tersebut.

Ketegangan semakin meningkat setelah sejumlah negara Eropa mengirim delegasi militer dalam skala kecil ke Greenland untuk mengikuti latihan pertahanan, yang juga melibatkan Amerika Serikat. Denmark bahkan mengusulkan agar NATO memulai operasi pengawasan di kawasan itu guna merespons dinamika keamanan yang berkembang.(gus,ant/dya)

RAHASIA SEHAT DI BALIK LEZATNYA COKELAT HITAM DAN BLUEBERRY

Di tengah kesibukan keluarga modern mengawali tahun 2026, kesadaran akan pentingnya asupan nutrisi fungsional semakin meningkat.

Pola makan tidak lagi semata-mata berfokus pada rasa kenyang, tetapi juga pada manfaat jangka panjang bagi kesehatan.

Perdebatan mengenai mana yang lebih unggul antara cokelat hitam dan blueberry dalam menangkal radikal bebas kini kembali menjadi sorotan para pemerhati kesehatan keluarga. Keduanya dikenal sebagai superfood, namun masing-masing membawa kekayaan nutrisi yang berbeda untuk melindungi tubuh dari ancaman penyakit kronis.

Cokelat hitam, yang sering kali dianggap sebagai kemewahan rasa, ternyata menyimpan kekuatan besar dalam bentuk flavanol.

Senyawa aktif ini bekerja secara spesifik pada sistem kardiovaskular dengan meningkatkan elastisitas pembuluh darah serta membantu melancarkan aliran oksigen ke seluruh tubuh.

Efek tersebut menjadikan cokelat hitam bukan hanya sekadar camilan, melainkan bagian dari strategi pencegahan penyakit jantung.

Bagi orang tua dengan aktivitas padat dan tingkat stres tinggi, konsumsi cokelat hitam dengan kandungan kakao di atas 70 persen bukan sekadar pemuasan lidah, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan jantung dan stabilitas tekanan darah.

Selain itu, kandungan antioksidannya juga diketahui berperan dalam mengurangi peradangan ringan yang kerap muncul akibat gaya hidup modern.

Di sisi lain, blueberry menawarkan keajaiban alami melalui pigmen antosianin yang memberikan warna biru pekat pada kulitnya.

Berbeda dengan cokelat hitam yang berfokus pada sirkulasi darah, blueberry lebih menonjol dalam perlindungan sel otak serta peningkatan fungsi memori. Antioksidan ini membantu melawan stres oksidatif yang dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif.

Bagi anak-anak yang sedang berada dalam masa pertumbuhan maupun lansia yang ingin menjaga ketajaman berpikir, buah mungil ini bertindak sebagai pelindung saraf yang sangat efisien.

Keunggulan utama blueberry terletak pada rendahnya kalori dan ketiadaan lemak jenuh, sehingga lebih aman dikonsumsi dalam jumlah banyak dibandingkan cokelat. Kandungan seratnya juga mendukung kesehatan pencernaan seluruh anggota keluarga.

Persaingan nutrisi ini sejatinya tidak melahirkan satu pemenang mutlak, melainkan sebuah sinergi yang saling melengkapi. Jika cokelat hitam unggul dalam kepadatan mineral seperti magnesium dan zat besi, blueberry memenangkan persaingan dalam kandungan vitamin C dan serat alami.

Menggabungkan keduanya dalam pola makan keluarga bukan hanya soal mengejar angka antioksidan, tetapi tentang membangun

benteng pertahanan tubuh yang berlapis dan berkelanjutan.

Agar manfaat dari kedua bahan ini optimal saat disajikan di rumah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.

Pertama, saat memilih cokelat hitam, periksa label kemasan untuk menghindari produk dengan kandungan gula berlebih atau minyak nabati terhidrogenasi.

karena zat tambahan tersebut dapat mengurangi efektivitas antioksidan. Idealnya, cokelat hitam dikonsumsi dalam porsi kecil, sekitar 20 hingga 30 gram per hari.

Sementara itu, blueberry sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan segar atau beku tanpa tambahan pemanis. Untuk anak-anak,

men campurkan potongan blueberry ke dalam yogurt atau menjadikannya topping oatmeal bersama serutan cokelat hitam dapat menjadi cara cerdas memperoleh manfaat ganda dalam satu sajian.

Hindari memasak blueberry dalam suhu tinggi terlalu lama, karena panas ekstrem berisiko merusak struktur antosianin yang berharga di dalamnya. Antosianin merupakan senyawa antioksidan utama yang berperan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga paparan panas berlebih dapat menurunkan

efektivitas manfaat kesehatan buah ini. Proses pemanasan yang terlalu lama juga dapat mengubah warna alami blueberry serta mengurangi kandungan vitamin dan fitonutrien lain yang sensitif terhadap suhu. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kualitas nutrisinya, blueberry sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi segar, dibekukan, atau hanya dimasak sebentar dengan suhu rendah sebagai pelengkap hidangan, bukan sebagai bahan utama yang dipanaskan intensif. (Nathasya - UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)

Kandungan Cokelat Hitam ($\geq 70\%$ Kakao)

Antioksidan:
Flavanol dan polifenol

Mineral:
Zat besi, magnesium, tembaga, mangan

Serat:
Tinggi serat pangan

Lemak:
Lemak sehat dari mentega kakao

Senyawa lain:
Kafein dan teobromin

Blueberry

Antioksidan:
Antosianin (baik untuk kesehatan otak)

Vitamin:
Vitamin C dan Vitamin K

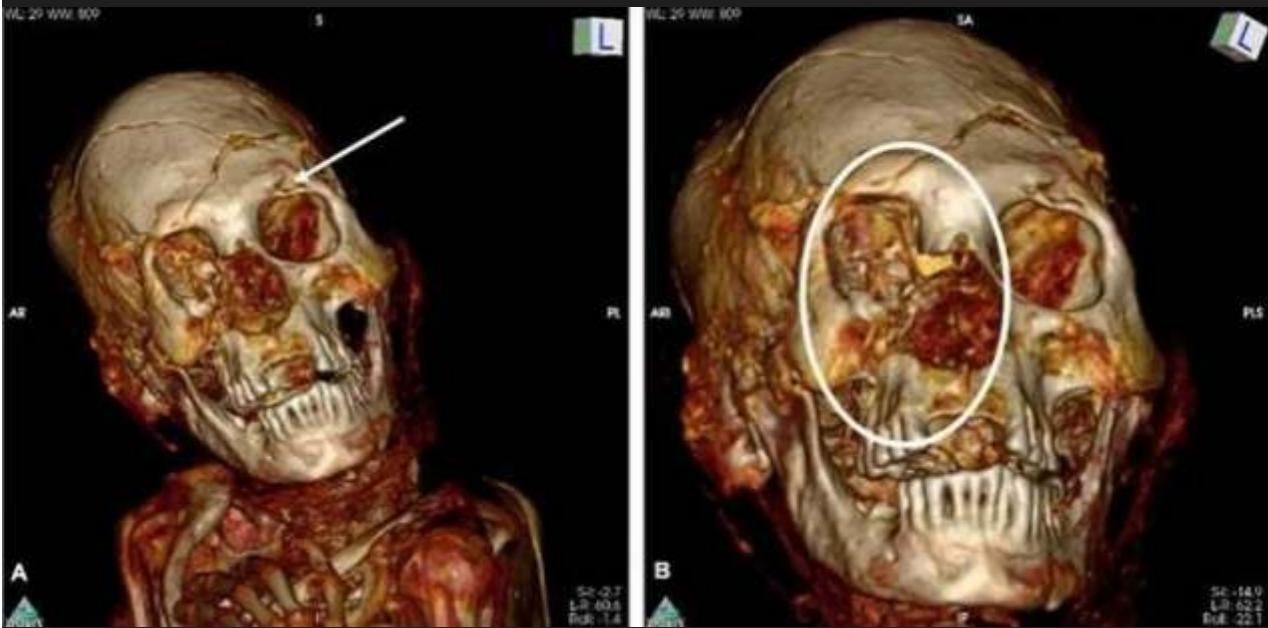
Serat:
Mendukung pencernaan dan kontrol gula darah

Mineral:
Mangan dan kalium

Karbohidrat:
Karbohidrat kompleks, indeks glikemik rendah



Ilmuwan Ungkap Penyebab Kematian Mumi Berusia 1.100 Tahun



Peneliti akhirnya berhasil mengungkap misteri penyebab kematian sebuah mumi berusia sekitar 1.100 tahun yang ditemukan di wilayah Chili. Berdasarkan hasil penelitian terbaru, kematian pria tersebut diduga kuat berkaitan dengan kecelakaan kerja saat melakukan aktivitas penambangan batu pirus, mineral berharga berwarna toska yang sejak lama dimanfaatkan oleh masyarakat kuno di kawasan Amerika Selatan.

Temuan ini dipublikasikan dalam sebuah studi yang dimuat di International Journal of Osteoarchaeology pada 1 Desember. Dua arkeolog dari Museum Nasional Sejarah Alam Santiago, Chili, yakni Catalina Morales dan Francisco Garrido, menjelaskan bahwa kerangka mumi memperlihatkan sejumlah trauma serius akibat benturan benda

tumpul. Pola cedera tersebut mengarah pada dugaan adanya runtuhannya atau robohnya langit-langit tambang saat korban sedang bekerja di dalamnya.

"Bukti pada kerangka menunjukkan cedera serius yang kemungkinan disebabkan oleh longsor batu atau runtuhannya langit-langit tambang," tulis para peneliti, sebagaimana dikutip dari Live Science.

Jenazah pria tersebut mengalami proses mumifikasi secara alami, tanpa campur tangan manusia melalui pembalseman. Saat ditemukan, mumi tersebut masih disertai sejumlah benda pribadi, seperti busur dan anak panah, serta perlengkapan yang diduga digunakan untuk menghisap zat halusinogen. Keberadaan artefak tersebut memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari dan praktik budaya masyarakat pada masa

itu. Mumifikasi alami sendiri terjadi ketika kondisi lingkungan, seperti udara kering dan suhu tertentu, mampu mengawetkan jaringan tubuh sehingga terhindar dari pembusukan.

Untuk mengungkap penyebab kematian secara lebih mendalam, Morales dan Garrido memanfaatkan teknologi modern berupa pemindaian CT scan dan pencitraan sinar-X. Metode ini memungkinkan para peneliti melihat kondisi tulang secara detail tanpa merusak struktur mumi. Analisis osteologis menunjukkan bahwa pria tersebut diperkirakan berusia antara 25 hingga 40 tahun saat meninggal dunia, usia yang tergolong produktif untuk pekerjaan fisik berat seperti penambangan. Selain itu, tim peneliti juga menerapkan metode penanganan radiokarbon untuk

menentukan usia mumi secara akurat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jenazah tersebut berasal dari periode antara tahun 894 hingga 1016 M. Sejumlah patah tulang yang belum sempat sembuh terlihat jelas pada tulang belakang bagian atas. Tak hanya itu, ditemukan pula patah tulang pada rusuk, tulang belikat, serta tulang selangka, yang semuanya mengindikasikan benturan keras akibat benda tumpul.

"Bagian dada kiri atasnya menanggung dampak terberat," tulis Morales dan Garrido dalam laporan penelitian. Benturan tersebut menyebabkan pergeseran beberapa ruas tulang belakang serta runtuhnya tulang rusuk, cedera yang kemungkinan besar bersifat fatal. Para peneliti juga mengidentifikasi adanya retakan pada tulang belakang bagian bawah, yang diduga merupakan sisa cedera lama sebelum kecelakaan utama terjadi.

Cedera pada tulang belakang, baik di bagian atas maupun bawah, diketahui sering berhubungan dengan kerusakan serius pada sumsum tulang belakang dan memiliki tingkat kematian yang tinggi, terlebih dalam kondisi medis pada masa lalu yang sangat terbatas. Dengan mempertimbangkan seluruh bukti osteologis dan konteks arkeologis, para peneliti menyimpulkan bahwa individu tersebut kemungkinan besar meninggal dunia saat sedang menambang batu pirus, ketika sebuah batu besar jatuh dari langit-langit tambang dan menimpa punggungnya secara langsung.

Meski demikian, Morales dan Garrido menegaskan bahwa penelitian lanjut masih diperlukan. Studi tambahan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi kerja, risiko keselamatan, serta kehidupan sosial para penambang kuno di wilayah Chili pada masa tersebut. (Nabilla - UINSA, Berkontribusi dalam tulisan ini)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO-SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGALEK:** TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM: DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION:** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS:** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS:** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI:** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP:** 031-87854491 | **PENERBIT:** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN:** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN:** 031-87854491 | **NIB:** 91205006801134 | **HARGA IKLAN:** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap berita dilengkapi dengan tanda pengenal kewbartahan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewbartahan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

Cek Trik Kecantikan Low Budget yang Efektif

Merawat diri seringkali dianggap membutuhkan biaya besar. Banyak orang beranggapan untuk tampil cantik dan menarik, seseorang harus membeli produk mahal atau melakukan perawatan rutin di klinik ternama.

Anggapan tersebut membuat perawatan diri seolah menjadi hal yang eksklusif dan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki anggaran besar. Dengan langkah yang tepat dan bahan yang mudah dijangkau. Siapapun bisa menjaga penampilan tetap segar dan menarik tanpa harus mengorbankan isi dompet.

Saat ini, tren beauty on a budget semakin digemari karena solusi praktis bagi mereka yang ingin tetap tampil percaya diri meski dengan anggaran terbatas. Tren ini menekankan bahwa perawatan diri bisa dilakukan dengan cara sederhana, menggunakan bahan yang mudah dijangkau, serta fokus pada kebutuhan kulit masing-masing. Berdasarkan sumber pada birdie.com, kunci utama perawatan kecantikan bukan terletak pada mahalnya produk, melainkan pada konsistensi, kebersihan dan pemahaman terhadap kondisi kulit sendiri.

Selain menghemat biaya, menerapkan trik kecantikan low budget juga membuat kita lebih peka terhadap kebiasaan kecil yang sering diabaikan dalam perawatan diri. Ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah dan tetap menghasilkan efek maksimal layaknya produk premium, seperti menggunakan bahan alami, menjaga pola tidur, hingga memastikan alat makeup selalu bersih. Berikut beberapa trik kecantikan low budget yang mudah diterapkan dan tetap memberikan hasil efektif.

Masker Alami Madu

Madu dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Kandungan antibakteri, antioksidan, serta pelembab alaminya mampu membantu menjaga kelembapan kulit dan melindungi wajah dari iritasi ringan. Penggunaan madu sebagai

masker wajah juga dipercaya dapat membantu mencerahkan kulit dan mengurangi jerawat.

Cara penggunaannya cukup sederhana. Madu murni dioleskan secara merata pada wajah yang telah dibersihkan, kemudian didiamkan selama 10-15 menit sebelum dibilas dengan air hangat. Masker ini cocok digunakan berbagai jenis kulit, termasuk kulit sensitif, karena sifatnya yang lembut dan tidak mengandung bahan kimia tambahan. Jika digunakan secara rutin, kulit wajah akan terasa lebih halus, lembap, dan tampak sehat alami.

Minyak Kelapa untuk Rambut dan Bibir

Minyak kelapa merupakan bahan alami multifungsi yang memiliki segudang manfaat kecantikan dengan harga yang ramah di kantong. Kaya akan asam lemak dan vitamin E. Minyak kelapa berperan sebagai pelembab alami yang mampu menutrisi rambut kering serta memperbaiki ujung yang bercabang, serta memberi kilau alami.

Untuk rambut, aplikasikan minyak kelapa secukupnya sebelum tidur atau sebelum keramas. Sementara untuk bibir cukup oleskan tipis sebagai pengganti lip balm. Penggunaan rutin dapat membuat bibir terasa lebih lembut dan terhindar dari pecah-pecah.

Scrub dari Gula dan Minyak Zaitun

Eksfoliasi tidak harus menggunakan produk khusus. Perpaduan antara gula dan minyak zaitun merupakan resep alami yang efektif untuk menjaga kulit tetap lembut, halus, dan sehat. Gula berperan sebagai eksfoliator alami yang membantu

mengangkat sel-sel kulit mati dan kotoran yang menumpuk di permukaan kulit.

Sendok Dingin Kurangi Kantung Mata

Siapa sangka, sendok yang biasa digunakan di dapur ternyata bisa menjadi alat kecantikan sederhana untuk mengatasi kantung mata. Metode ini memanfaatkan suhu dingin dari sendok logam yang disimpan di lemari es untuk membantu menyejukkan pembuluh darah di area bawah mata. Saat sendok dingin ditempelkan dengan lembut pada bagian tersebut efeknya dapat

membantu mengurangi pembengkakan, mengempiskan kantung mata, dan menyamarkan lingkar hitam akibat kurang tidur.

Es Batu agar Kulit Segar

Es batu tidak hanya dimanfaatkan sebagai pelengkap minuman, tetapi juga menjadi rahasia praktis untuk membuat kulit tampak segar dan bercahaya alami. Suhu dinginnya membantu mengecilkan pori-pori, meredekan kemerahan, serta mengontrol produksi minyak berlebih pada wajah. Penggunaan secara rutin, terutama pada pagi hari, disebut mama pu melancarkan sirkulasi darah di area wajah sehingga memberikan efek segar dan cerah tanpa bergantung pada produk perawatan berharga mahal. (Nabilla – UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)



Rupiah Sentuh Level ..dari hal 1

Meski sempat menunjukkan perbaikan pada paruh akhir perdagangan, penguatan rupiah belum cukup untuk membawa mata uang domestik ke zona positif. Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan bahwa perbaikan tersebut dipicu oleh penurunan tajam indeks dollar AS yang memberi ruang penguatan bagi mata uang negara berkembang.

"Rupiah ditutup melemah tipis, membalikkan sebagian besar perlemahan awal, didukung oleh penurunan tajam pada indeks dollar AS," ujar Lukman, Selasa (20/1/2026) sore.

Namun demikian, pelaku pasar masih cenderung berhati-hati dan memilih menahan transaksi menjelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia. Ketidakpastian arah kebijakan moneter menjadi faktor utama yang membuat investor mengambil posisi menunggu. Sikap wait and see ini membuat tekanan terhadap rupiah belum sepenuhnya mereda.

Dari sisi domestik, sentimen negatif turut membebani pergerakan rupiah. Isu pencalonan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia memicu kembali kekhawatiran pasar terhadap independensi bank sentral. Meski belum berdampak langsung terhadap kebijakan moneter, isu tersebut menambah tekanan psikologis di pasar keuangan.

"Namun rupiah masih gagal bangkit, dengan investor waswas mengantisipasi hasil RDG BI besok. Rupiah juga terbebani oleh berita pencalonan keponakan Prabowo sebagai deputi gubernur BI, yang semakin memicu kekuatiran independensi BI," kata Lukman.

Dengan kombinasi sentimen global dan domestik tersebut, rupiah diperkirakan masih bergerak terbatas dalam jangka pendek. Investor dinilai masih menunggu kepastian hasil RDG BI sebelum mengambil langkah agresif di pasar. "Rupiah diperkirakan masih dalam tekanan walau investor masih wait and see menantikan hasil RDG BI besok. Range Rp 16.900-Rp 17.000," ujar Lukman.

Tekanan terhadap rupiah juga diproyeksikan berlanjut pada perdagangan berikutnya. Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif namun tetap berada di zona merah. "Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 16.950-Rp 16.980," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis.

Ibrahim menilai tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari sentimen global, khususnya

meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi perang dagang baru. Hal itu dipicu oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana mengenakan bea tambahan terhadap sejumlah negara Eropa terkait ambisinya mengambil alih wilayah Greenland.

Selain itu, ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan menahan pemangkasan suku bunga karena kondisi pasar tenaga kerja AS yang masih kuat turut memperkuat dollar AS.

Dari sisi internal, meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) telah merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 menjadi 5,1 persen, sentimen positif tersebut belum mampu mengangkat rupiah.

Tekanan global yang kuat dinilai masih mendominasi pergerakan pasar valuta asing.

Sejumlah pengamat juga menilai bahwa perlemahan rupiah yang nyaris menyentuh Rp 17.000 per dollar AS tidak sepenuhnya disebabkan oleh isu masuknya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono ke jajaran Dewan Gubernur BI.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menegaskan bahwa faktor tersebut bukan penyebab utama perlemahan rupiah. "Persoalan Thomas Djiwandono menurut saya tidak terlalu besar dampaknya terhadap perlemahan mata uang rupiah," ujarnya.

Menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah lebih mencerminkan persoalan yang kompleks, baik dari sisi eksternal maupun internal. Ia mengakui adanya kekhawatiran publik terkait independensi BI, namun menilai posisi Thomas sebagai wakil menteri tidak memiliki kewenangan kebijakan strategis secara langsung.

Dampak ke Kehidupan Sehari-hari

Perlemahan rupiah bukan sekadar tercermin pada papan kurs di bank atau money changer. Dampaknya merambat luas ke berbagai sektor ekonomi dan secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika rupiah terdepresiasi, efek berantai muncul mulai dari harga barang hingga pola konsumsi rumah tangga.

Salah satu dampak paling cepat dirasakan adalah kenaikan harga barang impor. Depresiasi rupiah membuat produk-produk yang diperdagangkan dalam dolar AS, seperti elektronik, obat-obatan, hingga bahan baku industri, menjadi lebih mahal. Kenaikan biaya impor tersebut mendorong pelaku usaha menyesuaikan harga jual di pasar domestik, sehingga konsumen harus mengeluarkan dana lebih besar untuk barang yang sama.

Di sisi lain, biaya produksi dalam negeri ikut meningkat. Banyak industri nasional masih bergantung pada mesin, suku cadang, atau bahan baku impor. Ketika rupiah melemah, biaya produksi melonjak dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga produk, terutama di sektor manufaktur dan barang konsumsi.

Perlemahan rupiah juga memperkuat tekanan inflasi. Pelaku usaha cenderung menaikkan harga lebih cepat sebagai langkah antisipasi terhadap biaya yang terus meningkat. Akibatnya, kenaikan harga barang dan jasa meluas, sementara kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin tergerus.

Daya beli masyarakat pun menurun. Pendapatan yang diterima secara nominal mungkin tidak berubah, tetapi nilainya menyusut secara riil. Dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya mampu membeli barang dan jasa dalam

jumlah lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Penurunan daya beli ini menjadi salah satu dampak paling nyata dari perlemahan rupiah dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring meningkatnya harga, pola konsumsi masyarakat turut berubah. Pembelian barang non-essensial cenderung ditunda, sementara masyarakat beralih ke produk yang lebih terjangkau. Perubahan perilaku konsumsi ini berdampak pada perputaran ekonomi, khususnya di sektor ritel dan konsumsi rumah tangga.

Di tengah tekanan tersebut, para ekonom menilai peluang membalikkan tren perlemahan rupiah masih terbuka, meski bergantung pada sejumlah prasyarat. Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan peluang tersebut ditentukan oleh tiga faktor utama.

"Pertama, tekanan global mereda, misalnya suku bunga Amerika Serikat (AS) tidak kembali meningkat atau dolar melemah. Kedua, kepercayaan domestik membaik melalui kejelasan langkah fiskal dan komunikasi kebijakan yang meyakinkan. Ketiga, arus dana kembali masuk secara lebih stabil," kata Josua.

Namun demikian, Josua mengingatkan bahwa saat ini pasar masih menilai risiko rupiah cenderung mengarah ke perlemahan. Bahkan, terdapat prediksi rupiah berpotensi bergerak melewati Rp 17.000 per dolar AS jika sentimen tidak membaik. Faktor musiman, seperti mendekati periode Ramadhan dan musim pembagian dividen, juga berpotensi menambah permintaan dolar AS.

"Karena itu, mitigasi bank sentral tidak cukup hanya mengandalkan langkah stabilisasi rutin di pasar valuta," ujarnya. (wid,ktm,med,blo/dya)

Purbaya Klaim Bisa Pulihkan Semalam, tapi Ranah BI

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mengetahui penyebab utama perlemahan nilai tukar rupiah yang belakangan nyaris menyentuh level Rp 17 ribu per dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan, ia mengklaim kondisi tersebut sebenarnya bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Namun, Purbaya menegaskan stabilisasi nilai tukar bukan merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, melainkan otoritas Bank Indonesia (BI).

"Saya tahu betul alasannya kenapa (rupiah melemah) dan memperbaikinya dua hari, semalam dua malam selesai itu. Tapi saya bukan bank sentral," ujar Purbaya saat ditemui di kawasan

Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Purbaya mengaku heran karena perlemahan rupiah terjadi di tengah derasnya aliran modal asing yang masuk ke Indonesia melalui pasar modal. Menurutnya, secara logika ekonomi, masuknya kapital asing seharusnya memperkuat pasokan dolar dan menopang nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut juga dinilainya tidak sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang justru menunjukkan tren penguatan.

"Ketika kapital masuk ke sini besar, kenapa rupiahnya melemah? Coba tanya mereka deh, karena saya enggak bisa intervensi untuk

menjelaskan, nah itu kan otoritas bank sentral," katanya.

Purbaya menilai fondasi ekonomi Indonesia saat ini masih solid dan terus diperkuat, tercermin dari meningkatnya kepercayaan investor di pasar keuangan. Ia pun mengingatkan para pelaku pasar agar tidak mengambil posisi spekulatif berlebihan terhadap perlemahan rupiah. Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa penjelasan detail mengenai kebijakan nilai tukar sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia.

"Anda tanya ke Bank Sentral aja apa yang terjadi. Enggak ada alasan rupiah melemah ketika modal masuk ke sini. Makanya ada yang aneh kan?" ujarnya. (kcm,ist/dya)



DPRD SURABAYA SOROTI TITIK RAWAN MACET BAHTIYAR RIFAI: PENANGANAN HARUS TERKOORDINASI DAN TEGAS



SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menilai kondisi kemacetan lalu lintas di Kota Pahlawan masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan kota metropolitan lain seperti Jakarta. Meski demikian, ia mengingatkan adanya sejumlah titik krusial yang kerap mengalami kepadatan berulang. Pemicunya mulai dari proyek infrastruktur, aktivitas industri, hingga parkir liar dan bongkar muat di bahu jalan.

Bahtiyar mengungkap, kemacetan di Surabaya memang tidak terjadi secara merata. Melainkan terkonsentrasi di ruas-ruas tertentu. Diantaranya di Jalan Ahmad Yani, kawasan Margomulyo-Kalianak, Tol Tandes, serta wilayah yang sedang berlangsung proyek pembangunan jalan.

“Kalau dibandingkan Jakarta, Surabaya memang masih lebih baik. Tapi kita punya simpul-simpul kemacetan yang terus berulang, terutama di Ahmad Yani, Margomulyo-Kalianak, dan lokasi proyek,” kata Bahtiyar, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, kepadatan lalu lintas biasanya meningkat tajam pada jam sibuk pagi dan sore hari. Khususnya ketika arus kendaraan dari dan menuju Surabaya-Sidoarjo saling beririsan. Kondisi ini kerap diperparah

oleh pekerjaan proyek infrastruktur, salah satunya di kawasan Taman Pelangi.

Untuk itu, Bahtiyar menekankan, setiap proyek pembangunan harus dibarengi dengan perencanaan rekayasa lalu lintas yang matang sejak awal. Termasuk penyiapan jalur alternatif agar tidak menimbulkan kemacetan baru.

“Jangan sampai proyek sudah berjalan, tapi pengaturan lalu lintasnya tertinggal. Ini yang sering membuat kemacetan makin parah,” tuturnya.

Selain proyek, politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti lonjakan kemacetan saat long weekend dan libur nasional, terutama di kawasan Tol Tandes, Margomulyo, hingga jalur menuju Gresik. Tingginya mobilitas kendaraan berat dari kawasan industri dan pergudangan kerap menyebabkan penumpukan kendaraan hingga berjam-jam.

“Beberapa kali warga sampai butuh empat sampai lima jam hanya untuk keluar tol. Ini jelas merugikan masyarakat,” tambahnya.

Singgung Parkir Liar

Tak hanya itu, Bahtiyar juga mengidentifikasi parkir liar serta aktivitas bongkar muat di bahu jalan sebagai salah satu akar persoalan

kemacetan. Terutama di kawasan niaga dan pertokoan. Ia mencontohkan kondisi di Jalan Semut hingga kawasan Kembang Jepun yang kerap mengalami perlambatan arus akibat truk atau pikap berhenti sembarangan.

“Kalau ada kendaraan bongkar muat di bahu jalan, itu jelas tidak dibenarkan. Dampaknya langsung terasa, kendaraan melambat dan akhirnya macet,” ungkapnya.

Guna menekan persoalan tersebut, Bahtiyar mendorong penguatan pengawasan berbasis teknologi melalui optimalisasi kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan, khususnya di kawasan ruko dan jalur padat aktivitas logistik.

“Begitupantauada penyalahgunaan bahu jalan, harus segera ada tindakan tegas sebelum kemacetan meluas,” ucapnya.

Ia juga menyoroti masih maraknya parkir kendaraan besar di tepi jalan, terutama di wilayah Surabaya Utara seperti Perak dan sekitarnya. Meski mengapresiasi langkah penertiban yang telah dilakukan Pemkot Surabaya, Bahtiyar menilai konsistensi pengawasan harus terus diperkuat.

“Penertiban jangan hanya sesaat. Sopir truk harus sadar bahwa jalan umum bukan tempat parkir kendaraan besar,” tegasnya.

Dalam upaya penanganan kemacetan, Bahtiyar menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, tidak hanya Dinas Perhubungan, tetapi juga kepolisian, serta pelibatan pelaku usaha di kawasan industri dan pergudangan.

“Pengendara biasanya lebih patuh jika ada petugas resmi dan kepolisian. Selain itu, perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab, misalnya dengan menyiapkan area bongkar muat di dalam gudang, bukan di bahu jalan,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan pembentukan tim pengawasan berbasis zona agar penegakan aturan lebih terstruktur dan tidak saling lempar tanggung jawab. “Penanganan kemacetan tidak bisa reaktif. Harus direncanakan secara matang, kolaboratif, dan berkelanjutan,” kata Bahtiyar.

Ke depan, DPRD Surabaya akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada kelancaran mobilitas warga, tanpa memberatkan sopir maupun pelaku usaha, namun tetap melindungi hak masyarakat pengguna jalan.

“Tujuan akhirnya satu, warga tidak dirugikan. Mereka bisa berangkat dan pulang kerja tepat waktu, aktivitas ekonomi berjalan lancar, dan Surabaya tetap nyaman sebagai kota layak huni,” pungkasnya.(Adv,Ama/Dya)



**Penanganan
kemacetan tidak
bisa reaktif. Harus
direncanakan secara
matang, kolaboratif,
dan berkelanjutan.”**

BAHTIYAR RIFAI

Wakil Ketua DPRD
Kota Surabaya,